

# Perubahan Sosial dalam Novel Di Kaki Bukit Cibalak

## Karya Ahmad Tohari

**Dara Windiyarti**

Balai Bahasa Surabaya

Darawindiyarti3@gmail.com

### **Abstract**

*This article is proposed to study social problem which is reflected in novel Di Kaki Bukit Cibalak by Ahmad Tohari. The study employs close reading method based on Marxist theory. The result of the study shows that explicitly the novel reveal social problems caused by economic factor. Social conflict. Social conflict appears when corruption is committed by the village officers which lead to the oppressed classes. The conflict apparently dominates the story which involves the character's attitude, in this way this novel intensively tries to articulate the struggle of the oppressed to make oppressor aware that change is urgently needed. The social change must be performed to fulfill the desire of the oppressed, that is classless society*

**Key words:** *social change, social class, oppressor, oppressed.*

### **1. Pendahuluan**

Karya sastra diciptakan oleh sastrawan untuk dipahami, dinikmati, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Karya sastra menampilkan gambaran kehidupan; dan kehidupan itu sendiri adalah kenyataan sosial (Damono, 1997:1). Dalam hubungan itu, pemahaman terhadap karya sastra dilakukan dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan.

Kenyataan sosial dapat berupa masalah-masalah sosial yang ada pada masyarakat. Masalah sosial muncul akibat dari adanya interaksi sosial antara individu dengan kelompok, atau antarkelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan ideologi, yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Menurut Soekanto (1990:398–401), masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah-masalah sosial bisa bersumber pada faktor-faktor ekonomis, psikologis, dan kebudayaan.

Berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomi, teori Marxis dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah tersebut. Menurut Jefferson (1988:198), teori Marxis merupakan sebuah konsep dasar pemikiran bahwa kesususastraan dapat dipahami dengan betul hanya dalam sebuah kajian tentang realitas sosial. Dalam hal itu, Marx dan Engels (Damono, 1978:24–25), membicarakan sastra dalam hubungannya dengan faktor-faktor ekonomis dan peranan penting yang dimainkan oleh kelas sosial. Marx dan Engels memiliki gambaran bahwa sastra merupakan cermin masyarakat. Mereka sering menyebut-nyebut bahwa sastra mencerminkan kenyataan dengan berbagai cara. Marx mengatakan bahwa uang tidak hanya mengontrol manusia, tetapi juga merupakan lambang keterpencilan manusia dari dirinya sendiri dan masyarakat. Ia memuji Shakespeare yang telah menggambarkan esensi uang sebagai sesuatu yang berada di luar manusia, yang mengatur tindak-tanduknya, tetapi juga merupakan sesuatu yang diciptakannya untuk bisa dipergunakan.

Dalam kajian sastra Indonesia, studi sosiologi tentang sastra yang berbau Marxis, makin banyak dilakukan dengan diterapkannya kritik sastra Marxis. Dalam hubungan itu, Luxemburg (1989:24) mengungkapkan bahwa kritik sastra marxis berdasarkan pada filsafat Marx. Menurut Marx, susunan masyarakat dalam bidang ekonomi dinamakan bangunan bawah yang menentukan kehidupan sosial, politik, intelektual, dan kultural bangunan atas. Semua itu dilakukan secara terus-menerus untuk menuju masyarakat yang ideal tanpa kelas. Marx terutama menerangkan, bagaimana pertentangan antara kaum borjuis dan proletar menuju penghancuran sistem kapitalis. Adapun kaum proletar yang jaya dapat melaksanakan masyarakat tanpa kelas.

Menurut Berry (2003:24–25), perbedaan kelas muncul karena adanya pembagian kekuasaan yang sangat jelas sehingga dapat dibedakan antara kelas yang dominan dan berkuasa dari kelas-kelas di bawahnya. Kelas-kelas tersebut secara nyata atau secara potensial berada dalam konflik satu sama lain.

Di pihak lain, Selden (1989:24–25) mengatakan bahwa dalam teori Marxis pertentangan kelas-kelas sosial mengukuhkan latar timbulnya konflik-konflik ideologis. Menurut Marx, semua sistem mental (ideologis) adalah hasil-hasil keberadaan kemasyarakatan dan keekonomian. Kepentingan keberadaan kelas masyarakat yang dominan sebagaimana orang melihat keberadaan manusia, individu dan kolektif. Sistem hukum misalnya, bukanlah manifestasi murni manusia atau akal dewa (Tuhan), tetapi akhirnya mencerminkan kepentingan-kepentingan kelas yang dominan dalam periode-periode sejarah tertentu.

Sebagaimana diungkapkan Budiman (Eagleton, 2002:xxv) bahwa Eagleton yang membahas Marxisme, amat percaya bahwa karya-karya realis sejati dengan sendirinya sudah mendemonstrasikan suatu “keberpihakan objektif” terhadap kelas pekerja karena karya-karya tersebut dengan sendirinya pula telah menampilkan berbagai kekuatan sosial dalam masyarakat. Kritik sastra Marxis diasumsikan menjadi sebuah metode yang mampu mengungkapkan realitas sosial secara otonom dari subjektivitas kritikusnyanya. Pandangan itu merupakan konsekuensi dari keyakinan bahwa tindak penerapan kritik sastra Marxis terhadap telaah sastra identik dengan atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan melawan penindasan kelas.

Bertolak dari pandangan Marx yang menerangkan pertentangan antara kaum borjuis dan proletar menuju penghancuran sistem kapitalis, dan kaum proletar yang jaya dapat melaksanakan masyarakat tanpa kelas, diperoleh pemikiran bahwa karya sastra dapat dimengerti apabila dikaitkan dengan adanya pertentangan kelas sosial, dan pertentangan tersebut dimenangkan oleh kaum proletar yang berhasil menuju masyarakat yang tanpa kelas. Dengan melihat relasi antarperistiwa dan relasi antartokoh, novel *Di Kaki Bukit Cibalak* karya Ahmad Tohari (2001) dianalisis untuk mengungkapkan masalah sosial, yakni pertentangan antara kaum borjuis (penguasa) dan proletar (tertindas) menuju masyarakat idealis, masyarakat tanpa kelas yang ada dalam novel tersebut.

Novel *Di Kaki Bukit Cibalak* karya Ahmad Tohari (2001) dipilih sebagai objek kajian karena mengungkapkan masalah sosial, yaitu pertentangan antarkelas, antara kelas pemegang kekuasaan (penindas) dengan kelas rakyat kecil (tertindas). Di samping itu, Ahmad Tohari sebagai pengarang, gigih menyuarakan kaum tertindas. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah pengarang mengungkapkan perjuangan kaum tertindas melawan penindasan yang dilakukan oleh kaum penguasa sehingga mampu menegakkan keadilan, membawa perubahan sosial yakni mencapai masyarakat yang tanpa kelas melalui

novel *Di Kaki Bukit Cibalak*? Dengan menggunakan metode analisis teks, diharapkan permasalahan tersebut dapat diungkap.

## 2. Hasil dan Pembahasan

Novel *Di Kaki Bukit Cibalak* menyajikan masalah sosial yang bersumber pada ekonomi. Pak Dirga, Lurah Tanggir menolak peminjaman uang koperasi yang dilakukan Mbok Ralem, janda miskin yang mengalami sakit kanker leher dan memerlukan biaya pengobatan dengan alasan yang bersangkutan masih punya sisa pinjaman. Sebenarnya Pak Dirga bisa meminjam uang dari dana darurat koperasi, seperti yang diusulkan Pambudi. Pambudi adalah pemuda desa, pengurus lumbung koperasi yang ingin membuat badan sosial itu sungguh-sungguh merupakan sebuah koperasi yang banyak faedahnya bagi segenap penduduk Desa Tanggir. Pak Dirga menolak usul Pambudi, tetapi justru mengajak Pambudi melakukan *kong kali kong* dengan memanfaatkan dana darurat koperasi itu untuk mencari keuntungan pribadi. Istilah *kong kali kong* atau TST (Tahu Sama Tahu), pengertiannya tidak berbeda dari apa yang dilakukan dalam praktik korupsi (Abdullah dalam Sairin, 2002:200). Perhatikan dialog antara Pak Dirga, Pambudi, dan Mbok Ralem pada kutipan berikut.

“Pambudi,” kata Pak Dirga. “Hitung sekarang berapa pinjaman perempuan ini berikut bunganya sekarang.”

“Dua puluh tujuh setengah kilo,” jawab Pambudi dengan suara tertahan.

“Nah, itu. Utangmu dua tahun yang lalu belum bisa kaubayar kembali. Sekarang kau mau pinjam lagi, bagaimana?”

Mbok Ralem meremas-remas jarinya sendiri. Benjolan di lehernya terasa menggigit. Bibirnya gemetar mau bicara, tetapi tidak sepele kata pun berhasil diucapkannya. ....

“Dengar. Apa yang terjadi pada Mbok Ralem adalah sakit. Bukan bencana banjir, bukan bencana kebakaran. Pokoknya aku tak bisa memberi pinjaman sebesar yang ia perlukan. Apalagi dana darurat yang kaumaksud itu harus kita berikan cuma-cuma. Tidak mungkin. Aku sudah mempunyai rencana besar yang pelaksanaannya akan dibiayai dengan dana darurat itu.”

“Apa lagi rencana Bapak itu?”

“Kau tak perlu tahu! Oh, maksudku kau belum saatnya kuberitahu.”

“Kali ini saya harus tahu. Soalnya, saya ingin tahu, penting mana rencana Bapak itu dengan keharusan kita menolong Mbok Ralem.....”

“Dengarlah, anak muda. Pertama-tama kukatakan kepadamu bahwa inilah kesempatan yang dapat kauambil untuk mendapat keuntungan yang besar. Marilah kita bekerja sama. Kau tahu, uang yang dijanjikan pemerintah sebesar 2.000 rupiah untuk tiap batang pohon kelapa yang tergusur, akan lambat datangnya. Uang milik koperasi dapat kita pakai dulu untuk membayarkan ganti rugi kepada pemilik pohon kelapa. Kita tidak akan membayar 2.000 tiap batang, tetapi cukup 1.000 saja. ....Bayangkan, pemborong yang sedang membangun jembatan Kali Benda itu berani membayar 2.500 per batang. Wah, Pambudi, apa tidak lumayan? Bila kau mau, kau dapat juga membeli sepeda motor, seperti Poyo. Enak, bukan?” (DKBC:21–26).

Kutipan di atas dapat dipahami bahwa di desa tersebut terdapat tiga macam kelas sosial, yaitu kelas pejabat desa (lurah), kemudian kelas pemimpin organisasi sosial (ketua koperasi), dan terakhir adalah kelas (kaum) kawula (*nerima*). Kategori pertama yaitu pejabat

desa yang diwakili Pak Dirga, memiliki kekuasaan paling tinggi. Kategori kedua yaitu pemimpin organisasi sosial yang diwakili Pambudi, memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana koperasi. Kategori ketiga adalah kaum kawula (penduduk desa yang *nerima*) yang diwakili Mbok Ralem, tidak memiliki kewenangan apa pun, bahkan tidak memiliki hak untuk bicara.

Kelas-kelas tersebut berada dalam konflik yang dipicu oleh tindakan sewenang-wenang oleh kaum yang memiliki kekuasaan terhadap kaum yang tidak memiliki kekuasaan dan kaum lemah, yakni adanya penguasaan ekonomi oleh kaum penguasa (pejabat desa). Dalam hal ini, kekuasaan didefinisikan (menurut Max Weber) sebagai “kemungkinan bagi seseorang dalam hubungan sosial berada dalam suatu posisi untuk melaksanakan keinginannya sendiri walaupun ada perlawanan” (Berry, 2003:205). Hubungan ekonomi dengan pemanfaatan dana darurat koperasi dengan perhitungan kaum penguasa (Lurah Tanggir) secara otoriter, mengakibatkan terjadinya pertentangan kelas yang dalam hal ini dimenangkan oleh penguasa. Posisi Pak Dirga sebagai Lurah Tanggir memiliki ruang untuk melaksanakan keinginannya sendiri. Kekuasaan tertinggi pada tingkat desa itulah yang menyebabkan munculnya otorisasi Pak Dirga dalam pengambilan keputusan yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk korupsi. Pada kasus ini, meskipun rencana manipulasi (korupsi) Pak Dirga itu telah ditentang oleh Pambudi, ia tetap melakukan korupsi sesuai keinginannya sendiri. Hal itu menandakan bahwa jabatan dapat menciptakan perbedaan kelas yakni kelas pemegang kekuasaan (penguasa) dan kelas bukan pemegang kekuasaan (tertindas) karena dalam tindak kejahatan korupsi, yang dirugikan (ditindas) selalu rakyat kecil (kaum lemah). Mbok Ralem sebagai kaum lemah tidak memperoleh hak untuk menikmati (memanfaatkan) dana darurat koperasi. Demikian pula penduduk Desa Tanggir pemilik pohon kelapa, hak pribadinya untuk memperoleh uang sebagaimana mestinya, juga dirampas orang (orang-orang) yang memiliki kekuasaan.

Situasi yang meresahkan penduduk Desa Tanggir, khususnya Mbok Ralem, itu memicu timbulnya konflik (individual) dalam diri Pambudi yang kemudian mendorong keinginannya untuk bertindak, berjuang menegakkan keadilan. Menurut pemikiran Pambudi, tindakan Pak Dirga harus dicegah karena dapat membahayakan kehidupan warga desa, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Pambudi pun menempuh jalan menolak *kong kali kong* yang ditawarkan Pak Dirga, bahkan keluar dari kepengurusan koperasi sebagai aksi protesnya terhadap kesewenang-wenangan Pak Dirga.

Jika Pambudi menerima tawaran Pak Dirga, maka yang terjadi adalah kepincangan sosial yang semakin tajam, dan ikatan sosial semakin memudar. Keterikatan antara individu dengan kelompok sosial yang dibutuhkan semua lapisan masyarakat tidak lagi ada, dan yang muncul adalah individualitas. Setiap orang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga yang kuat (berkuasa) semakin kaya dan yang lemah (tertindas) semakin miskin. Hal itu jelas mempertajam jurang pemisah antara kelompok borjuis (penguasa) dengan kelompok proletar (tertindas), atau mempertebal garis kelas-kelas sosial yang dapat mempersubur tumbuhnya penindasan atau perbudakan.

Dalam hubungan itu, Pambudi tetap kuat dengan pendiriannya. Ia tetap ingin menyelesaikan masalah Mbok Ralem dengan caranya sendiri. Dengan bantuan surat kabar *Kalawarta* Yogyakarta yang bersedia membuka kolom dompet sumbangan kemanusiaan, penyakit Mbok Ralem pun bisa diatasi. Berita tersebut kemudian diketahui oleh seluruh pejabat pemerintahan, dan dianggap sebagai hal yang memalukan karena telah melibatkan

pihak luar (*Kalawarta*) ikut campur menangani masalah sosial yang seharusnya bisa diatasi sendiri. Tentang persoalan itu, Gubernur menegur Bupati. Bupati kemudian memanggil Pak Camat dan Pak Lurah Tanggir (Pak Dirga) untuk menghadapnya. Pak Camat dan Pak Lurah dianggap selebor terhadap masalah kemanusiaan itu.

Atas kejadian itu, timbul perasaan dendam dalam diri Pak Dirga terhadap Pambudi. Pak Dirga kemudian mencari siasat untuk menyingkirkan atau menjatuhkan Pambudi yang telah mempermalukan Pak Dirga. Pak Dirga menyuruh Bagol mencuri ayam-ayam peliharaan ayah Pambudi sekaligus menaburkan guna-guna untuk menghancurkan Pambudi. Sejak Pambudi mengetahui ulah Pak Dirga yang sangat membencinya itu, ia pun pergi meninggalkan Desa Tanggir menuju Yogyakarta untuk memperkukuh harga diri dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup. Ia pun akhirnya berhasil melanjutkan kuliah sambil bekerja sebagai jurnalis pada harian *Kalawarta* Yogyakarta atas tawaran Pak Barkah, pemimpin redaksi yang dulu membuka kolom dompet sumbangan kemanusiaan untuk Mbok Ralem.

Sementara Pambudi berada di Yogyakarta, Pak Dirga membuat siasat lagi untuk menjatuhkan nama Pambudi sekaligus mencari solusi untuk memecahkan persoalan tindak korupsi yang telah ia lakukan. Cara yang ditempuh Pak Dirga adalah melakukan manipulasi pembukuan koperasi di desanya. Ia menyuruh Poyo, pegawai koperasi yang sepaham dengan dirinya untuk melakukan perombakan total seluruh pembukuan koperasi yang pernah dipegang Pambudi. Buku pembukuan yang lama dari Pambudi diganti dengan pembukuan versi baru, di mana dana sebesar Rp125.000,00 yang digunakan Pak Dirga untuk membiayai pelantikannya dibukukan sebagai dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pambudi. Dengan demikian, Pak Dirga memperoleh dua keuntungan sekaligus. Pertama, harga diri Pambudi jatuh (hancur) karena seolah-olah Pambudi telah melakukan korupsi. Keuntungan kedua, Pak Dirga tidak perlu mempertanggungjawabkan dana koperasi yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Untuk memastikan agar nama Pambudi benar-benar bisa hancur, Pak Dirga juga meniupkan berita kepada warga desa bahwa Pambudi keluar dari kepengurusan koperasi dengan membawa lari dana koperasi sebesar Rp 125.000,00. Dengan demikian, warga desa akan membenci dan menjauhi Pambudi, sementara Pak Dirga masih memperoleh simpati atau dukungan dari warganya sebagai Lurah Tanggir, serta dapat leluasa mengelola dana sosial desa.

Di harian *Kalawarta*, karier Pambudi sebagai jurnalis semakin cemerlang. Tulisan-tulisan Pambudi semakin dikenal orang secara luas. Pambudi tidak menyia-nyiakan peluang untuk meningkatkan kariernya sekaligus membalas kejahatan Pak Dirga melalui media massa tersebut. Pambudi yang telah meraih gelar sarjana muda teknik, dapat mengungkap kebobrokan moral Pak Dirga, Lurah Tanggir itu. Berkat tulisan-tulisan Pambudi di harian *Kalawarta*, Pak Dirga dicopot dari jabatan Lurah Tanggir.

Sementara Pambudi berada di Yogyakarta tepatnya tahun kedua, Sanis, gadis desa pujaan Pambudi itu telah diperistri Pak Dirga. Pambudi pun akhirnya menjalin cinta dengan Mulyani, teman sekampusnya. Gadis beretnis Cina, anak mantan majikan Pambudi itu sangat mencintainya dengan kesadaran pemahaman latar sosial yang berbeda. Ketika ayah Pambudi meninggal dunia, Pambudi pulang ke Desa Tanggir, Mulyani pun datang menyusul Pambudi. Pambudi kemudian mengetahui bahwa lurah Desa Tanggir telah digantikan oleh seorang pemuda lulusan STM bernama Hadi yang memiliki pandangan sejalan dengan Pambudi. Di pundak Hadi inilah Pambudi berharap agar Desa Tanggir bisa berubah menuju perbaikan sesuai keinginan warga desa. Demikian pula Hadi, sangat menaruh hormat kepada Pambudi

yang telah lulus sarjana teknik yang seolah menitipkan amanat kepada dirinya untuk memperbaiki desanya.

Dari peristiwa-peristiwa di atas dapat diungkapkan bahwa golongan yang memiliki kekuasaan melakukan penindasan kepada golongan yang tidak memiliki kekuasaan (lemah). Penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan Pak Dirga berupa korupsi dan penekanan-penekanan kepada warganya. Hal itu terlihat pada tidakan-tindakannya, antara lain menolak permohonan Mbok Ralem meminjam dana koperasi, mengatasnamakan orang lain (Pambudi) dalam melakukan tindakan korupsi, dan memperistri Sanis, gadis belia (15 tahun) kekasih Pambudi. Tindak kejahatan Pak Dirga tersebut dapat terjadi karena ia merupakan (mewakili) kelas dominan yang memiliki kekuasaan sehingga mampu mengatur kelas-kelas di bawahnya sesuai keinginan pribadinya. Pambudi dengan jabatan sebagai pengurus koperasi, merupakan kelas di bawah kekuasaan pejabat desa (lurah) yang tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur kelas tersebut. Di sini terlihat jelas adanya jarak antarkelas yang disebabkan oleh pembagian kekuasaan. Lurah adalah jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan paling tinggi di desa sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan desa. Sementara itu, pengurus koperasi bukan jabatan pemerintahan dan tidak memiliki kapasitas kekuasaan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan persoalan-persoalan penting desa. Di samping itu, juga terlihat jelas adanya jarak yang tajam antara kaum penguasa dengan kelas paling bawah yaitu kaum lemah seperti Mbok Ralem, Sanis, dan penduduk Desa Tanggir yang bekerja sebagai penadap gula dari pohon kelapa.

Motivasi utama dari semua tindakan Pak Dirga tersebut sebenarnya untuk mempertahankan kekuatannya sebagai pejabat desa. Sebagai pejabat desa, ia membutuhkan "nama besar", baik dari segi material (kekayaan) maupun kejantanan. Korupsi yang dilakukan Pak Dirga merupakan praktik penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi dan golongannya, yakni memperoleh kekuatan dari aspek material. Sementara itu, tindakan mengawini Sanis untuk memperoleh kekuatan dari aspek kejantanan. Tindakan-tindakan Pak Dirga tersebut sangat merugikan kepentingan masyarakat luas atau publik.

Faktor yang mendorong munculnya tindak korupsi Pak Dirga adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang muncul dari individu itu sendiri, yaitu berkaitan dengan mentalitas. Pak Dirga merasa tidak puas dengan penghasilan yang ia peroleh walaupun menurut pendapat umum sebenarnya penghasilan itu telah cukup untuk menghidupi keluarganya secara wajar. Oleh karena itu, ia berusaha menempuh berbagai jalan baik yang dilakukan sesuai peraturan dan etika maupun yang bertentangan peraturan dan etika. Yang penting baginya adalah segera bisa terpuaskan. Akibatnya, ia mencari jalan dengan cara melakukan korupsi karena memiliki kekuasaan dan wewenang .

Adapun faktor eksternal yang mendorong munculnya tindak korupsi Pak Dirga adalah adanya beban kultural. Beban kultural berkaitan dengan beban yang harus dipikul seseorang sebagai akibat dari tuntutan nilai yang datang dari masyarakat sendiri. Sebagai seorang penguasa atau pucuk pimpinan desa, Pak Dirga merasa ada semacam tuntutan kultural yang datang dari masyarakat untuk memenuhi standar simbol-simbol kehidupan tertentu sesuai dengan tuntutan zaman.

Penyalahgunaan jabatan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan Pak Dirga dapat dikategorikan sebagai bentuk penindasan. Adanya penindasan yang dilakukan golongan penguasa terhadap golongan lemah (tertindas), memicu timbulnya perlawanan terhadap penindasan tersebut. Resistensi berimplikasi pada dampak positif yakni untuk menumbuhkan

kesadaran bagi golongan penindas, sehingga terjadi perkembangan sosial berupa terciptanya perubahan dalam pemerintahan Desa Tanggir sesuai dengan keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut. Dalam hal itu, Pambudi bertindak sebagai *hero* yang menyelamatkan kaum tertindas.

Berkaitan dengan telaah sastra, tokoh Pambudi merupakan sosok benang merah yang dipakai oleh pengarang untuk menipiskan adanya pertentangan kelas sosial. Dalam teori Marxis, pertentangan kelas dimenangkan oleh kaum proletar menuju masyarakat tanpa kelas. Ini telah dilakukan oleh Pambudi yang berasal dari kelas yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi memiliki nyali yang kuat dalam berjuang melawan kekuasaan dominan untuk menegakkan keadilan, dan mengangkat warga desa sebagai kaum lemah (kelas bawah) menuju perubahan yang lebih baik (tanpa kelas).

Golongan tertindas atau golongan yang tidak memiliki kekuasaan yang diwakili Pambudi, mampu memanfaatkan media massa (*Kalawarta*) untuk melakukan perlawanan terhadap golongan penguasa yang diwakili Pak Dirga. Tindakan Pambudi dalam penyembuhan penyakit Mbok Ralem lewat bantuan *Kalawarta* merupakan perlawanan pertama terhadap golongan penindas. Perlawanan tahap pertama itu tidak membawa hasil, bahkan menimbulkan penekanan-penekanan lebih jauh yang dilakukan oleh penindas antara lain tindakan Pak Dirga yang mengawini Sanis, pacar Pambudi. Namun, pada tindakan kedua, yakni pemuatan berita-berita lewat *Kalawarta* tentang kenyataan yang dilakukan penguasa (Lurah Tanggir), merupakan perlawanan telak, sehingga membawa hasil yang sempurna, yakni dicopotnya jabatan Pak Dirga dari Lurah Tanggir. Sebenarnya perlawanan Pambudi sudah bermula ketika ia menolak ajakan Pak Dirga untuk *kong kali kong* dalam pembiayaan ganti rugi pohon kelapa milik penduduk, juga tidak keluar dari kepengurusan koperasi, meski belum membuahkan hasil.

Keberhasilan Pambudi dalam menegakkan keadilan tidak terlepas dari keinginan kerasnya untuk mengubah nasib hidupnya dengan cara pergi ke kota untuk menuntut ilmu (melanjutkan kuliah). Dengan pengetahuan yang tinggi maka daya intelektualnya meningkat sehingga mampu mengambil sikap (tindakan) tepat dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di desanya.

Harapan kaum lemah (tertindas) yang diwakili Pambudi adalah adanya dampak positif bagi semua lapisan penduduk Desa Tanggir dari peristiwa pencopotan jabatan Lurah Tanggir tersebut. Kesadaran dari penguasa untuk melakukan perubahan terutama pada aspek ekonomi, merupakan harapan utama bagi masyarakat Desa Tanggir. Sebuah perubahan yang didambakan kaum tertindas yakni menuju masyarakat yang ideal tanpa kelas.

Setelah melalui suatu proses yang panjang, perubahan di Desa Tanggir akhirnya memperoleh hasil. Perubahan itu berjalan sejak pemerintahan desa dipegang oleh Hadi, pemuda desa yang dipercayai sebagai Lurah Tanggir pengganti Pak Dirga melalui perjuangan Pambudi. Pambudi, mewakili kaum tertindas, menaruh harapan pada “era baru” itu sehingga dapat memberi kepuasan bagi semua warga Desa Tanggir yang terletak di kaki bukit Cibalak. Dengan terbongkarnya kasus korupsi Lurah Tanggir, penduduk desa dapat berpikir secara terbuka, tidak lagi merasa tertekan (terpaksa) dalam menyikapi segala hal yang bisa merugikan siapa saja.

Perubahan yang terjadi di Desa Tanggir adalah adanya perubahan cara pengelolaan (manajemen) pemerintahan desa. Pemerintahan lama yang korup berubah menjadi pemerintah baru yang bersih (bebas korupsi) setelah dilakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Pembenahan manajemen keuangan dalam pemerintahan

Desa Tanggir diawali dengan pemberantasan korupsi antara lain mengembalikan fungsi koperasi sebagaimana mestinya, yakni mengutamakan kepentingan sosial (kemanusiaan) dalam penggunaan dananya. Pemberantasan korupsi juga ditujukan kepada Lurah Tanggir yang melakukan manipulasi harga ganti rugi pohon kelapa milik penduduk desa yang terkena proyek jembatan.

Analisis peristiwa dari pandangan Marx yang mengatakan bahwa uang tidak hanya mengontrol manusia, tetapi juga merupakan lambang keterpencilan manusia dari dirinya sendiri dan masyarakat, dapat dibuktikan sebagai berikut. Pak Dirga adalah manusia yang hidupnya diombang-ambingkan oleh uang. Ia mengejar uang dengan cara yang tidak terpuji antara lain pertama, menindas rakyat kecil (miskin) yaitu mengkorupsi hasil ganti rugi pembebasan pohon kelapa milik warga desa yang terkena proyek pembangunan jembatan di desanya; dan kedua, mengkambinghitamkan orang lain (anak buahnya) yang tidak mau diajak “kerja sama” dengan cara melakukan manipulasi pembukuan keuangan koperasi. Tindakan Pak Dirga itu telah mengantarkannya sebagai manusia “lain” baik untuk dirinya, maupun untuk masyarakat. Di mata penduduk Desa Tanggir bahkan pada tingkat kabupaten, kehadiran Pak Dirga sudah tidak dikehendaki lagi. Ia telah dipecat dari jabatan lurah oleh bupati. Hal itu menunjukkan bahwa uang dapat mengontrol manusia dan menjadikan manusia sebagai mahluk yang terpencil dari lingkungannya (masyarakat).

Yang mendasari diri Pak Dirga dalam keterpencilan (keterasingan) adalah tidak adanya kerelaan untuk menerima realita kehidupan sebagaimana adanya. Ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan peranan yang disandang sebagai Lurah Tanggir. Lurah yang memiliki peluang untuk mengelola atau mengatur uang desa ternyata justru menjerat dirinya dalam ketidakberdayaan; tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan peranannya.

Jika manusia (Pak Dirga) telah terpenuhi (terpuaskan) kebutuhan materialnya (uang), maka ia dapat menyesuaikan diri dengan peranannya sebagai Lurah Tanggir, dan tidak perlu melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti tindak korupsi yang membawa dirinya dalam keterasingan. Hal itu tidak lepas dari faktor internal, yakni moral. Moral Pak Dirga yang rendah, tidak mampu menangkis godaan-godaan yang bersifat material.

Esensi uang sebagai sesuatu yang berada di luar manusia, telah mengatur tindak-tanduk Pak Dirga. Tindak-tanduk Pak Dirga selalu berorientasi pada uang, maksudnya adalah bahwa ia bersedia berbuat –dengan menggunakan kekuasaannya secara otoriter– untuk memperoleh uang. Dengan demikian, fungsi uang sebagai sesuatu yang diciptakan manusia untuk bisa dipergunakan, tidak berjalan. Di sini uang memiliki peran atau pengaruh kuat terhadap manusia dalam menentukan sikap dan tingkah laku.

Perubahan lain yang terjadi di Desa Tanggir adalah perubahan budaya (tradisi) setelah masuknya arus modernisasi perkotaan ke pedesaan. Pambudi, pemuda desa setelah melanjutkan sekolah (kuliah) di kota berani menerobos tradisi desa dengan cara menjalin cinta dengan seorang perempuan (gadis) kaya beretnis Cina yang berasal dari kota. Tradisi desa tentang perjodohan, kawin-mawin dengan penduduk setempat (desa) sebagai budaya tradisional (lokal) telah berubah (berkembang) menjadi budaya yang modern, yakni perkawinan antara pribumi dengan nonpribumi. Dengan berbaurnya (masuknya) etnis Cina ke dalam kehidupan masyarakat desa akan memberi warna tersendiri bagi masyarakat desa, khususnya keluarga Pambudi. Etnis Cina sebagai simbol kapitalis dengan budaya (tradisi) yang kuat –mempertahankan rasnya– telah diruntuhkan oleh kaum proletar (masyarakat desa) lewat tokoh Pambudi.

Namun, apakah terobosan baru yang dilakukan Pambudi itu akan memberi dampak positif, yakni meningkatnya perekonomian bagi penduduk Desa Tanggir? Apakah Pambudi akan mengabdikan diri misalnya dengan mengembangkan atau membudidayakan potensi-potensi alam yang ada di Desa Tanggir setelah meraih gelar sarjana teknik dan menikah dengan Mulyani? Yang pasti, penduduk Desa Tanggir tidak ingin kehilangan Pambudi dan menyandarkan harapannya kepada Pambudi.

### 3. Simpulan

Perbedaan kelas muncul karena adanya pembagian kekuasaan yang sangat jelas sehingga dapat dibedakan antara kelas dominan berkuasa dan kelas berkuasa yang berada di bawahnya. Kelas-kelas tersebut secara nyata atau secara potensial berada dalam konflik satu sama lain. Pertentangan kelas antara golongan rakyat kecil (miskin), pemilik pohon kelapa yang akan memperoleh ganti rugi karena terkena proyek pembangunan jembatan dengan golongan yang memiliki kekuasaan yakni pejabat desa (lurah) yang menciptakan (mengatur) mekanisme pasar (harga) pohon kelapa.

Faktor yang mendorong munculnya tindak korupsi Pak Dirga adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang muncul dari individu itu sendiri, yaitu berkaitan dengan mentalitas. Faktor eksternal yang mendorong munculnya tindak korupsi Pak Dirga adalah adanya beban kultural sebagai akibat dari tuntutan nilai yang datang dari masyarakat sendiri.

Perbedaan porsi kekuasaan pada kelompok penguasa yang mengakibatkan terjadinya konflik antarindividu atau antarkelompok sebagai reaksi sosial. Ketimpangan sosial masyarakat terjadi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat desa dalam pengelolaan dana sosial desa.

Perubahan kehidupan masyarakat desa dicapai melalui kesadaran dari penguasa (Lurah Tanggir) yang baru. Dengan demikian, keresahan sosial-ekonomi dapat diatasi melalui keberanian untuk mengungkap kebobrokan moral kaum penguasa.

### Daftar Pustaka

- Berry, David. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset.
- Damono, Sapardi Djoko. 1978. *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . 1997. *Sosiologi Sastra*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Eagleton, Terry. 2002. *Marxisme & Kritik Sastra*. Terjemahan Zaim Rafiki. Jakarta: Desantara.
- Jefferson, Ann dan David Robey (ed.). 1988. *Teori Kesusastraan Modern Pengenalan Secara Perbandingan*. Terjemahan Mokhtar Ahmad. Kualau Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Luxemberg, Jan Van, Mieke Bal, Willem G. Weststseijn. 1989. *Pengantar Ilmu Sastra* Diterjemahkan oleh Dick Hartoko. Jakarta: PT Gramedia.
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Selden, Raman. 1989. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*. Kentucky: The University Press of Kentucky.

*Perubahan Sosial dalam Novel Di Kaki Bukit Cibalak ... (Dara Windiyarti)*

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
Tohari, Ahmad. 2001. *Di Kaki Bukit Cibalak*. Jakarta: Gramedia.